



Tercatat 1.296 Siswa Difabel

Keberadaannya di Semua Kelas

JOGJA, Radar Jogja - Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja memiliki beragam standar dalam mengategorikan difabel atau disabilitas. Salah satu yang turut melakukan pencatatan adalah Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kota Jogja. Melalui Unit Layanan Disabilitas (ULD) tercatat sebanyak 1.296 anak difabel di Kota pelajar.

Kepala ULD Disdikpora Kota Jogja Aris Widodo mengatakan, anak dengan kesulitan belajar masuk dalam kategori difabel. Indikatornya dilihat melalui kriteria ketuntasan minimal (KKM). "Kami ingin mengintervensi berkaitan dengan akses pendidikan. Sehingga anak yang terhambat belajar karena kekhususan tertentu, dia difabel," cetusnya.

Merujuk Perda DIJ No 4/2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas, anak dengan *slow learner* sudah masuk kategori difabel. Tapi di dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi (Dinsos Nakertrans) tidak mencatatnya. *Slow learner* dapat diketahui



dari kemampuannya dalam memenuhi KKM. Jika terdapat empat KKM yang tidak terpenuhi, dia tergolong *slow learner*. Tapi kalau semua KKM tidak terpenuhi, masuk disabilitas mental ringan. "Itu klasifikasinya, sehingga jumlahnya banyak sekali. Tiap Kelas ada," bebernya.

Mendukung program Kota Jogja yang inklusi, Disdikpora Kota Jogja pun mendistribusikan guru pendamping khusus (GPK). Tercatat sebanya 150 GPK di Kota Gudeg. Sebanyak 106 di 72 sekolah negeri dengan latar pendidikan luar biasa dan psikologi. Sebanyak 44 GPK bertugas di sekolah swasta. "GPK di sekolah swasta merupakan guru mapel dengan tugas tambahan. Karena mereka jadi GPK setelah mendapat pelatihan," sebutnya.

Direktur Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak (SAPDA) Nurul Saadah Andriani membenarkan, pemenuhan hak-hak anak

difabel secara umum terhambat. Diakibatkan oleh situasi yang bergantung pada lingkungan tempat tinggal difabel, baik di rumah, sekolah, atau panti. "Masih ditemukan orang tua (ortu) yang bingung bagaimana bertindak yang tepat bagi difabel," ujarnya.

Kebingungan orang tua, sekolah, dan panti dalam menyikapi difabel ini semakin kompleks. Terlebih saat difabel beranjak masuk masa pubertas. Lantaran difabel cenderung lebih sering tantrum. Sementara lingkungannya memiliki keterbatasan dalam memahami kehendak difabel. "Maka kami merekomendasikan, ada pendidikan kesehatan reproduksi untuk anak disabilitas usia remaja dengan melibatkan ortu/pengasuh/pendamping," cetusnya.

Perwakilan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah Luar Biasa (MKK-SLB) Kota Jogja Sri Andarini Eka Prapti mengharapkan, ada perhatian khusus pada difabel. Lantaran keminatan dan potensi difabel kurang mendapat ruang. "Setelah lulus SMA, banyak orang tua yang bingung anaknya akan menjadi apa. Sehingga harapannya ada program diploma bagi difabel," tandasnya. **(fat/eno/by)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005